

Persepsi Stakeholder Terhadap Dampak Penetapan Kelembagaan Konservasi Penyu Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat

Stakeholders' Perceptions of the Impact of Establishing the Turtle Conservation Institutional Technical Implementation Unit in Pariaman City, West Sumatra

*Halimah Dwi Yolanda¹, Kastana Sapanli², dan Nuva²

¹Program Studi Ekonomi Kelautan Tropika, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University
Jalan Agatis Kampus IPB Dramaga, Dramaga, Bogor, 16680, Indonesia

²Departemen Ekonomi Sumberdaya Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University
Gedung Fakultas Ekonomi dan Manajemen W3 L2, Kampus IPB Jl. Agatis, Babakan, Kec. Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16680, Indonesia

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 20 Februari 2024
Perbaikan naskah: 25 November 2024
Disetujui terbit : 12 Mei 2025

Korespondensi penulis:
Email: mazlan1999.m113@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/marina.v1i1.13885>



ABSTRAK

Tantangan konservasi penyu seperti perburuan penyu secara liar, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam ekowisata, dan perlunya perubahan pola pikir masyarakat terhadap nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan penyu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari penetapan kelembagaan yang disebut Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dan persepsi *stakeholder* dan merumuskan kebijakan pengelolaannya agar berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan survei dengan teknik sensus, melibatkan 36 responden yang terdiri dari pelaku usaha, tenaga kerja, dan *stakeholder* terkait. Penelitian ini menggunakan metode *share income* untuk mengevaluasi dampak ekonomi, dan analisis kualitatif untuk menilai dampak sosial dan lingkungan dari penetapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) konservasi Penyu di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Mei 2024 di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT Konservasi Penyu memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal, dengan rata-rata *share income* yang sangat tinggi. Meskipun demikian, keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan ekowisata masih tergolong rendah, meskipun tingkat konflik dan frekuensi kriminalitas di kawasan ini rendah. Dari segi lingkungan, kualitas udara dan keindahan alam dinilai sangat baik, tetapi masih ada tantangan dalam hal kebersihan dan pengelolaan sampah. Peran *stakeholder* sangat penting untuk kebijakan yang mendukung keberlanjutan kawasan konservasi yang berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi UPT Konservasi Penyu Kota Pariaman. .

Kata Kunci: persepsi; *stakeholder*; konservasi penyu; dampak ekonomi; dampak sosial; dampak lingkungan; ekowisata

ABSTRACT

This study examines key challenges in sea turtle conservation, including illegal hunting, limited community engagement in ecotourism, and the need to shift cultural perceptions surrounding sea turtles. A survey-based approach employing a census technique was used, involving 36 respondents comprising business actors, workers, and relevant stakeholders. The study aims to analyse the economic, social, and environmental impacts of the establishment of the Sea Turtle Conservation Technical Implementation Unit (Unit Pelaksana Teknis/UPT) in Pariaman City, West Sumatra Province. It focuses on stakeholder perceptions and formulates management policies to promote sustainability. The *share income* method was employed to evaluate economic impact, while qualitative analysis was used to assess social and environmental effects. The research was conducted between April and May 2024 at the UPT Sea Turtle Conservation Centre in Pariaman City. The findings indicate that the UPT significantly contributes to the local economy, with a notably high average *share income*. However, community participation in ecotourism remains relatively low, despite the area's low levels of conflict and criminal activity. From an environmental perspective, air quality and natural beauty are rated highly, although challenges persist in terms of cleanliness and waste management. The role of stakeholders is pivotal in developing policies that support the sustainability of the conservation area, directly influencing the success of the UPT Sea Turtle Conservation management in Pariaman City.

Keywords: perception; *stakeholder*; turtle conservation; economic impact; social impact; environmental impact; ecotourism

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyu merupakan jenis reptil yang telah dimanfaatkan untuk kebutuhan subsisten, ekonomi dan budaya bagi masyarakat pesisir di seluruh Indonesia (Ario *et al.*, 2016). Pemanfaatan penyu

yang tinggi oleh manusia menyebabkan populasi penyu mengalami penurunan. Disamping pengaruh manusia, faktor alam juga mengancam keberadaan penyu seperti predator, penyakit dan perubahan iklim (Firliansya *et al.*, 2017). Semua jenis penyu masuk ke dalam *red list* di IUCN (*International Union For Conservation of Nature and Natural Resources*) dan

Appendiks I CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) yang berarti penyu adalah hewan yang terancam punah dan dilindungi termasuk kedalam Apendix I CITES serta Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya. Semua jenis penyu dan telurnya dilindungi dari perdagangan dan eksploitasi oleh manusia, maka diperlukannya konservasi penyu (Wilson *et al.*, 2014). Konservasi penyu merupakan bagian dari upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang diiringi dengan pengelolaan kawasan, sering kali dikembangkan sebagai destinasi ekowisata yang menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan ekowisata (Komarudin, N., & Fahrunnisa, 2023).

Ekowisata konservasi penyu di Indonesia merupakan salah satu bentuk pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk melindungi spesies penyu yang terancam punah sekaligus memberikan edukasi kepada wisatawan tentang pentingnya konservasi alam (Harteti *et al.*, 2014). Ekowisata ini tidak hanya melindungi penyu, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui partisipasi dalam pengelolaan wisata dan penciptaan lapangan kerja (Harnino *et al.*, 2021). Di Indonesia banyak wisata berbasis konservasi penyu beberapa Lokasi terkenal yakni Taman Nasional Kepulauan Seribu di DKI Jakarta, Taman Nasional Meru Betiri di Jawa Timur, Pantau Sukmade di Banyuwangi Jawa Timur, Pulau Derawan di Kalimantan Timur, *Turtle Conservation and Education Center* di Serangan Bali, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Pariaman di Pariaman Sumatera Barat juga menjadi pusat konservasi penting di wilayah tersebut (Usman, 2016).

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang kaya akan keindahan alam dan budaya di Indonesia. Provinsi ini memiliki potensi besar untuk mengembangkan pariwisata bahari dan ekowisata. Wisata bahari dan ekowisata di Sumatera Barat tidak hanya menawarkan keindahan alam bawah laut, tetapi juga keanekaragaman hayati, budaya lokal, serta kegiatan ekowisata yang berkelanjutan, di Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa kawasan ekowisata diantaranya Taman Nasinal Bukit Barisan Selatan terletak di Kabupaten Pesisir Selatan, Taman Wisata Alam Bung Hatta di Bukit Tinggi, Taman Wisata Alam Lembah Anai di Kabupaten Padang Pariaman, Kawasan Wisata Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan, Kepulauan Mentawai yang terdiri dari beberapa pulau di

dalamnya yang terletak di Kepulauan Mentawai, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu di Kota Pariaman, serta berbagai Pantai (BPS, 2024).

Kota Pariaman merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat yang memiliki banyak tempat wisata yang indah, terkenal akan keindahan Pantai, serta objek wisata yang bisa dikunjungi (Zikri *et al.*, 2023). Salah satunya yang terkenal ialah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu yang sedang dikembangkan sebagai kawasan ekowisata terletak di Desa Apar Kecamatan Pariaman Utara. Kawasan konservasi ini tidak hanya memberikan edukasi tentang penyu, tetapi juga menawarkan pemandangan pantai, sehingga menarik minat pengunjung untuk belajar dan berwisata. Sejak dibentuk pada tahun 2006 sebagai bagian dari kawasan konservasi perairan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu ini telah melewati beberapa fase pengembangan, mulai dari penangkaran penyu hingga pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu telah berhasil menetas dan melepaskan sekitar 30.000 tukik sampai tahun 2022, dengan tujuan meningkatkan pelestarian penyu dan ekonomi lokal melalui perbaikan fasilitas ekowisata pada kawasan konservasi yang berperan penting bagi perlindungan keanekaragaman hayati agar tetap terjaga (Rianto, 2012).

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu ditetapkan menjadi Kawasan konservasi berdasarkan SK Walikota Pariaman tanggal 20 Oktober 2010 berdasarkan SK No. 334/523/2010 dengan *property right* atau kepemilikan kawasan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. UPT sebagai tempat penelitian telah menjadi fokus utama untuk memahami berbagai aspek yang terkait dengan konservasi spesies penyu berdasarkan Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan didalamnya termasuk suaka perikanan, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2004 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pada awalnya, kawasan konservasi ini dibuat pada tahun 2006 yakni dengan membangun fasilitas penangkaran penyu yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman yang pada saat itu menjadi bagian dari kawasan konservasi perairan daerah, Pada tahun 2009 Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) kemudian berubah nama menjadi Kawasan Konservasi Perairan (KKP). Pada tahun 2013 hingga sekarang berganti nama kembali menjadi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Konservasi Penyu yang masih berada dibawah pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu menjadi objek penelitian yang menarik karena melibatkan berbagai unsur yang sangat relevan pada konteks keberlanjutan, yakni aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Hal ini disebabkan karena kompleksitas interaksi antara manusia dan habitat penyu, dan perlunya pendekatan yang holistik untuk memahami dampak dan peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu dalam masyarakat dan lingkungan sekitar kawasan konservasi. Ada permasalahan pada unsur ekonomi karena keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu yakni memiliki dampak ekonomi yang signifikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat lokal dan wilayah sekitarnya. Namun, mulai tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami penurunan jumlah pengunjung yang berdampak pada ekonomi masyarakat lokal yang membuka usaha di sekitar kawasan konservasi. Pada periode tersebut terjadi penurunan jumlah pengunjung di UPT Konservasi Penyu. Hal tersebut karena penyebaran Covid-19 serta kurangnya minat wisatawan berkunjung ke kawasan ekowisata konservasi penyu, maka diperlukannya kerjasama dari berbagai *stakeholder* untuk membangkitkan ekowisata konservasi penyu untuk keberlanjutan ekowisata konservasi penyu dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan berkelanjutan.

Selain berdampak pada ekonomi dari penetapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariman juga berdampak pada sosial dan lingkungan masyarakat sekitar kawasan. Untuk dampak sosial dari penetapan kawasan konservasi penyu yakni masih adanya perburuan liar dan pengambilan telur penyu yang masih menjadi tantangan besar yang menyebabkan penurunan populasi penyu. Kondisi ini diperburuk bahwa perilaku tersebut dianggap sebagai nilai budaya turun-menurun bagi masyarakat sekitar untuk mengkonsumsi telur penyu dan menjual telur penyu. Oleh karena itu, *stakeholder* diharapkan dapat terlibat dalam membantu masyarakat sekitar dalam mengubah mata pencaharian dari yang semula menjual telur penyu ke mata pencaharian lain, menghilangkan nilai budaya yang sudah ada sejak lama, serta mengurangi konflik kepada masyarakat lokal sekitar kawasan konservasi.

Selain itu, dampak lingkungan karena keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu memiliki dampak yang dapat memengaruhi ekosistem dan biodiversitas di kawasan tersebut. Aspek lingkungan menjadi penting untuk dianalisis

mengingat dampak positif dan negatif yang mungkin timbul dari kegiatan konservasi penyu. Oleh karena itu, pengelolaan konservasi penyu dapat dilakukan dengan cara yang berkelanjutan sehingga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan tetap menjaga keberagaman hayati di kawasan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu dapat membantu untuk merancang strategi yang lebih berkelanjutan pada pengelolaan sumber daya alam. Pelestarian penyu yang terancam punah penting melibatkan berbagai *stakeholder* pada proses penetapan dan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu di Kota Pariaman tidak dapat diabaikan. Penyu, sebagai spesies yang dilindungi, memerlukan perhatian khusus untuk memastikan keberlangsungan hidupnya di tengah tantangan yang dihadapi, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat lokal, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, dapat menciptakan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan konservasi ini.

Persepsi dari berbagai *stakeholder* menjadi kunci untuk memahami dampak yang ditimbulkan oleh UPT Konservasi Penyu. Arifin *et al.* (2023) menyampaikan bahwa persepsi merupakan proses pemberian makna, interpretasi dari stimuli dan sensasi yang diterima oleh individu dan sangat dipengaruhi faktor-faktor internal maupun eksternal dari masing-masing individu tersebut. Sambodho (2020) berpendapat bahwa faktor-faktor yang dapat memengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu kebijakan adalah sosial budaya, pemahaman individu dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Mengidentifikasi dan menganalisis pandangan serta kebutuhan masing-masing pihak, kita dapat merumuskan strategi yang tidak hanya melindungi penyu, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan menjaga keseimbangan ekosistem. Upaya konservasi yang efektif harus mampu mengatasi tantangan seperti perburuan liar dan pengambilan telur penyu, dan mengubah pola pikir masyarakat terhadap nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan penyu. Persepsi dapat dikatakan sebagai kejadian pertama dalam rangkaian proses menuju perubahan stimulus menjadi tindakan atau sebagai sensasi yang berarti atau bermakna (Nisa *et al.*, 2023).

Pengelolaan UPT Konservasi Penyu di Kota Pariaman harus dilakukan secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kerjasama yang sinergis antara semua pihak, diharapkan UPT ini dapat menjadi model bagi kawasan konservasi lainnya di

Indonesia, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

Pengelolaan konservasi penyu di UPT Pariaman dapat berlangsung secara berkelanjutan, diperlukan meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi penyu sebagai habitat pendaratan penyu bertelur dan ekowisata. Oleh karena itu, pendekatan multidimensi dapat digunakan untuk melihat berbagai permasalahan yang kompleks dari sisi usaha konservasi, ekonomi, sosial, serta hukum dan kelembagaan. Hasil analisis ini selanjutnya dapat digunakan untuk menelaah efektivitas pengelolaan yang telah dilakukan serta mendesain pengelolaan kawasan di masa depan.

Stakeholder adalah setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan perusahaan (Kasali dalam Santika, 2019). Menurut Ghozali dan Chariri (dalam Puspita, 2015). Teori *stakeholder stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan perusahaan, namun juga harus memberikan manfaat bagi *stakeholder* (pemegang saham, kreditor, konsumen, pemasok, analis, karyawan, pemerintah, dan pihak lain seperti masyarakat yang merupakan bagian dari lingkungan sosial). Persepsi *stakeholder* adalah pandangan, penilaian, atau pemahaman yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan terkait suatu organisasi, proyek, atau keputusan. Ini mencakup bagaimana *stakeholder* melihat dan menafsirkan tindakan, tujuan, dan dampak dari suatu entitas (Nisa *et al.*, 2023).

Konservasi penyu merupakan bagian dari upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang diiringi dengan pengelolaan kawasan, sering kali dikembangkan sebagai destinasi ekowisata yang menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan ekowisata (Komarudin, N., & Fahrunnisa, 2023). Penyu adalah spesies hewan yang hidup dipermukaan bumi dari zaman purba jutaan tahun silam dan masih bertahan hingga kini (Marlian *et al.*, 2021). Kehidupan penyu saat ini mulai terancam punah, penyu sebagai satwa langka yang bukan milik satu negara saja, tetapi menjadi milik dunia sehingga kelestariannya harus dijaga oleh semua bangsa. Penyu merupakan reptil yang hidup di laut serta mampu bermigrasi dalam jarak yang jauh di sepanjang kawasan Samudra Hindia, Samudera Pasifik, dan Asia Tenggara.

Di dunia ada tujuh macam jenis penyu, oleh CITES (*Convention International Trade in Endangered of Wild Flora and Fauna*) penyu

dimasukkan sebagai hewan yang terancam punah, dan harus dilindungi serta tidak dieksploitasi dalam bentuk apapun. 6 dari 7 jenis penyu yang hidup di perairan di Indonesia, yaitu Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*), Penyu Hijau (*Chelonia mydas*), Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*), Penyu Pipih (*Natator depressus*), Penyu Lekang (*Lepidochelys olivacea*), Penyu Tempayan (*Caretta caretta*) (Yuliany *et al.*, 2023). Semua jenis penyu yang ada di Indonesia telah dilindungi oleh Undang-Undang Negara PP/1999 tentang pengawetan tumbuhan dan jenis satwa yang dilindungi (Direktorat Konservasi dan Taman Nasional) (Wardani, R. I., & Mulasari, 2016).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yaitu: 1) menganalisis dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari penetapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang merujuk pada persepsi berbagai *stakeholder*. 2) mengidentifikasi kebijakan pengelolaan secara berkelanjutan dan holistik. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan strategi pengelolaan yang efektif, termasuk pengembangan kemitraan dan kolaborasi antara *stakeholder* yang berbeda.

Pendekatan Ilmiah

Penelitian dilakukan pada bulan April sampai bulan Mei 2024 di wilayah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman. Metode penelitian berupa metode survei dengan teknik sensus karena sampel yang dipilih sesuai dengan jumlah pelaku usaha, tenaga kerja, *stakeholder* yang terlibat yakni pengelola UPT, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi, Aparatur Desa dan Tokoh Adat atau Tokoh Masyarakat. Jumlah responden 36 orang terdiri dari 20 orang pelaku usaha, 8 orang tenaga kerja, dan 2 orang dari masing-masing *stakeholder*. Pemilihan jumlah responden sebanyak 36 orang dengan komposisi pelaku usaha, tenaga kerja, dan *stakeholder* terkait didasarkan pada pendekatan sensus yang bertujuan untuk mengakomodasi seluruh populasi relevan. Hal ini memastikan data yang valid, representatif, dan komprehensif untuk mendukung analisis yang akurat dalam penelitian konservasi penyu di Kota Pariaman. Apabila subjek penelitian kurang dari 100 orang, sebaiknya diambil seluruh subjeknya (Arikunto, 2021). Namun, jika subjeknya lebih dari 100 orang, dapat diambil 10-15% atau 20-25%. Sumber data dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara. Data sekunder diperoleh dari instansi resmi, dengan pengumpulan

data dan informasi dilakukan dengan observasi lapangan, penggunaan kusioner, wawancara dan studi literatur.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan metode analisis skala *likert*. Data dianalisis dengan teknik analisis *stakeholder* secara kualitatif. Dampak ekonomi dianalisis dengan menggunakan metode *share income*, sedangkan untuk melihat dampak sosial dan dampak lingkungan dari penetapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu ini menggunakan metode analisis skala *likert*. Metode *share income* dalam usaha konservasi penyu adalah model keuangan di mana pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas konservasi, seperti ekowisata atau penjualan produk terkait penyu, dibagi dengan berbagai pihak yang terlibat. Pendapatan ini dapat digunakan untuk pembiayaan konservasi, pemberdayaan masyarakat lokal, dan peningkatan kualitas hidup terkait dengan habitat penyu. Dampak ekonomi dalam hal ini berupa manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang bekerja di sektor wisata, baik bagi tenaga kerja maupun masyarakat pelaku usaha yang terlibat di lokasi wisata. Hal tersebut dilihat dari kontribusi penerimaan (*share income*) yang berasal dari ekowisata terhadap total penerimaan rumah tangga. Bagi pelaku usaha, nilai *share income* ekowisata yang diterima pemilik usaha terhadap penerimaan rumah tangga dapat diperoleh dengan mencari terlebih dahulu keuntungan yang diperoleh pemilik usaha dari usaha wisatanya. Keuntungan yang diperoleh pemilik usaha ditentukan menggunakan asumsi bahwa keuntungan tersebut masuk ke dalam penerimaan rumah tangga sepenuhnya. Oleh karenanya, menghitung analisis pendapatan dilakukan dengan fomulasi sebagai berikut (Istiqomah *et al.*, 2019).

$$\pi = TR - TC \quad \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- π = Pendapatan dari unit usaha dan tenaga kerja di lokasi ekowisata (Rp/bulan)
- TR = Total penerimaan (*revenue*) dari unit usaha dan tenaga kerja di lokasi ekowisata (Rp/bulan)
- TC = Total biaya (*cost*) usaha di lokasi ekowisata (Rp/bulan)

Total revenue merupakan seluruh penerimaan yang diterima pemilik usaha dari sektor wisata. Sementara itu, *total cost* merupakan biaya operasional yang dikeluarkan pemilik usaha setiap bulan. Komponen biaya operasional terdiri dari biaya

sewa, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya kebersihan, biaya keamanan, biaya listrik dan air, serta biaya pemeliharaan alat. Perhitungan selisih antara total *revenue* dan total *cost* akan mendapatkan nilai pendapatan dari pemilik usaha.

Tahap berikutnya adalah menentukan *share income*. Dampak ekonomi pengelolaan ekowisata di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu terhadap masyarakat lokal pelaku usaha dapat dilihat dengan mengkaji *share income* ekowisata terhadap total penerimaan rumah tangga. Analisis ini digunakan untuk mengetahui bagaimana kontribusi penerimaan wisata terhadap pemilik usaha dan tenaga kerja di lokasi wisata. Perhitungan *share income* memiliki formula yang sama, baik untuk pemilik usaha maupun tenaga kerja. Rumus perhitungan *share income* ekowisata terhadap penerimaan rumah tangga adalah sebagai berikut (Nurizky, 2023).

$$Prt = Pk + Plut$$

$$\% Pk = Pk Prt \times 100\% \quad \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

- Prt = *Income* rumah tangga pelaku ekowisata (Rp)
- Pk = *Share income* ekowisata (Rp)
- $Plut$ = *Income luar* ekowisata (Rp)

Dengan ketentuan kategori sebagai berikut (Nurizky, 2023) :

- a. Jika *share income* ekowisata < 25% terhadap penerimaan rumah tangga pelaku usaha, maka kontribusi dikategorikan sangat rendah.
- b. Jika *share income* ekowisata < 25% – 49% terhadap penerimaan rumah tangga pelaku usaha, maka kontribusi dikategorikan rendah.
- c. Jika *share income* ekowisata 50% – 75% terhadap penerimaan rumah tangga pelaku usaha, maka kontribusi dikategorikan tinggi.
- d. Jika *share income* ekowisata > 75% terhadap penerimaan rumah tangga pelaku usaha, maka kontribusi dikategorikan sangat tinggi.

PERSEPSI *STAKEHOLDER* TERHADAP DAMPAK EKONOMI

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Perkembangan sector pariwisata yang berkelanjutan serta adanya partisipasi yang aktif dari masyarakat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengoptimalkan

semua sumberdaya yang dimiliki di tiap daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Anggarini, 2021). Dampak ekonomi dari penetapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu dihitung melalui *share income* dari 20 pelaku usaha dan 8 pekerja. Pelaku usaha terdiri dari 19 pelaku usaha yang memiliki jenis usaha warung dan 1 pelaku usaha sebagai tukang serta 8 pekerja yang bekerja sebagai petugas tiket, petugas pemberi pakan, pemandu ekowisata, satpam, motoris, dan petugas kebersihan di kawasan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman.

Persepsi *stakeholder* terhadap UPT Konservasi Penyu Kota Pariaman dapat dicerminkan dari *share income* yang mereka terima. Menurut Stem et al. (2003), manfaat ekonomi langsung seperti peningkatan pendapatan dapat membentuk persepsi positif masyarakat terhadap program konservasi. Selain itu, Salafsky et al. (2001) menekankan bahwa persepsi keberhasilan konservasi oleh masyarakat lokal sangat berkorelasi dengan sejauh mana mereka merasakan manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut, termasuk melalui distribusi pendapatan. Dengan kata lain, semakin besar *share income* yang dirasakan oleh pelaku usaha dan tenaga kerja lokal, semakin tinggi pula persepsi positif dan dukungan mereka terhadap keberlangsungan program konservasi.

Persepsi *stakeholder* terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman dapat dilihat dari *share income* yang mereka terima. Pendapatan yang diperoleh oleh pelaku usaha warung, tukang, dan tenaga kerja menunjukkan dampak ekonomi positif yang mendorong dukungan dan keterlibatan mereka dalam kegiatan konservasi. Dengan demikian, *share income* menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan konservasi tidak hanya dari sisi lingkungan tetapi juga dari aspek sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Berikut adalah *share income* dari pelaku usaha di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman.

Tabel 1 menunjukkan bahwa rata – rata *share income* ekowisata Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman terhadap pendapatan total pemilik usaha memiliki kontribusi sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari persentase *share income* yang mencapai 100% atau lebih dari 75% yang berarti seluruh pendapatan pemilik usaha berasal dari sektor ekowisata serta pemilik usaha tidak memiliki pekerjaan lain di luar sektor ekowisata Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aryunda (dalam Ardiyanto, 2019) bahwa masyarakat yang memiliki usaha di sektor pariwisata mengalami kenaikan penghasilan sebesar 79 - 100 %. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ekowisata merupakan strategi pembangunan ekonomi lokal berbasis konservasi yang efektif terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia (Ardiyanto et al., 2019).

Apabila *share income* lebih dari 75%, maka dikategorikan sebagai kontribusi sangat tinggi; 50–75% sebagai tinggi; 25–49% sebagai sedang; dan kurang dari 25% sebagai rendah. Klasifikasi ini digunakan dalam berbagai kajian sosial-ekonomi untuk mengukur tingkat ketergantungan terhadap sumber pendapatan tertentu. Hal ini sejalan dengan pendapat Scheyvens dalam Mulyana (2019) yang menyatakan bahwa ekowisata merupakan salah satu wisata alternatif dianggap salah satu cara untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan karena dianggap bisa memberikan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, serta meningkatkan pengembangan kemampuan berusaha serta memberikan kesempatan yang lebih besar untuk mengontrol penggunaan sumber daya alam di daerah tertentu sebagai salah satu aset kegiatan bisnis ekowisata (Ashley & Roe, dalam Mulyana, 2019).

Selanjutnya, perhitungan *share income* rumah tangga dari sektor ekowisata terhadap penerimaan total rumah tangga pada tenaga kerja di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman yang ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 1. *Share Income* Pelaku Usaha.

No	Jenis Usaha	Pendapatan rata-rata ekowisata perbulan (Rp)	Penerimaan total rata-rata perbulan (Rp)	<i>Share income</i> wisata terhadap penerimaan total (%)	Kategori Kontribusi
		A	B	$c = a/b \times 100\%$	
1	Warung	1.260.526	1.260.526	100	Sangat tinggi
2	Tukang Foto	1.500.000	1.500.000	100	Sangat tinggi
Rata- rata <i>share income</i> pelaku usaha				100	Sangat tinggi

Sumber : Data primer diproses, 2024.

Tabel 2. *Share Income* Tenaga Kerja.

No	Jenis Usaha	Pendapatan rata-rata ekowisata perbulan (Rp)	Penerimaan total rata-rata perbulan (Rp)	<i>Share income</i> wisata terhadap penerimaan total (%)	Kategori Kontribusi
		A	B	$c = a/b \times 100\%$	
1	Petugas Piket	3.000.000	5.000.000	60,00	Tinggi
2	Petugas pemberi Pakan	3.000.000	6.000.000	50,00	Tinggi
3	Pemandu Ekowisata	3.000.000	5.000.000	60,00	Tinggi
4	Satpam	2.900.000	5.400.000	53,70	Tinggi
5	Petugas pemberi pakan	3.000.000	4.800.000	62,50	Tinggi
6	Motoris	3.000.000	4.200.000	71,43	Tinggi
7	Petugas kebersihan	3.000.000	5.500.000	54,55	Tinggi
8	Petugas kebersihan	3.000.000	5.500.000	54,55	Tinggi
Rata- rata <i>share income</i> tenaga kerja				58,34	Tinggi

Sumber : Data primer diproses, 2024.

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa *share income* tertinggi dimiliki oleh tenaga kerja motoris sebesar 71,43% dengan kategori kontribusi tinggi. Hal ini dikarenakan tenaga kerja tersebut walupun memiliki pekerjaan lain di luar sektor wisata tidak sebesar tenaga kerja lainnya pendapatan diluar sektor wisatanya. Secara keseluruhan *share income* ekowisata tenaga kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu termasuk kedalam kategori tinggi dengan persentase 58,34%. Nilai tersebut menunjukkan keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu berperan penting bagi tenaga kerja karena kontribusi *share income* ekowisata menyumbang lebih dari 50% total penerimaan. Tingginya *share income* rumah tangga dari sektor wisata terhadap penerimaan total rumah tangga tenaga kerja karena tenaga kerja juga memiliki usaha lain di bidang non wisata seperti sebagai pembudidaya ikan, marketing, dan pedanggang asongan di tempat tinggalnya.

Berdasarkan wawancara dan observasi lapangan, persepsi *stakeholder* terhadap peran ekowisata di UPT Konservasi Penyu cukup positif dan mendukung, yakni dengan adanya ekowisata dapat meningkatkan stabilitas ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja yang tetap dan rutin meskipun dalam skala kecil – menengah, kontribusi ekowisata terhadap pendapatan tenaga kerja dirasakan langsung yakni bagi tenaga kerja yang sebelumnya memiliki pekerjaan tetap atau hanya bekerja musiman, serta *stakeholder* juga menganggap ekowisata sebagai bentuk konservasi yang produktif yang tidak hanya menjaga kelestarian penyu, dengan kegiatan ini juga memberikan manfaat ekonomi nyata bagi tenaga kerja.

PERSEPSI STEKHHOLDERS TERHADAP DAMPAK SOSIAL

Persepsi *stakeholder* (pemangku kepentingan) terhadap dampak sosial dalam konservasi penyu sangat penting untuk dipahami karena menentukan keberhasilan program konservasi. *Stakeholder* yang positif terhadap konservasi penyu akan mendukung, bahkan terlibat aktif, sedangkan persepsi negatif dapat menjadi penghambat. Pemahaman yang mendalam mengenai persepsi ini membantu dalam merancang strategi konservasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dampak sosial dari penetapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman dilihat dari persepsi *stakeholder*, baik bagi masyarakat pelaku usaha, pekerja dan pengelola Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Aparatur Desa Apar, dan Tokoh Adat / Tokoh Masyarakat Desa Apar. Perhitungan skala likert menggunakan enam kategori aspek sosial, yaitu keterlibatan masyarakat lokal, tingkat konflik dengan masyarakat lokal, frekuensi kriminalitas, aksesibilitas, pelayanan petugas, dan keamanan area parkir. Hasil perhitungan skala *likert* persepsi masyarakat pelaku usaha terhadap kondisi sosial dengan penetapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman dapat dilihat pada Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa persepsi *stakeholder* yang terdiri dari pemilik usaha, tenaga kerja, pengelola Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Aparatur Desa Apar, Tokoh Adat / Tokoh Masyarakat Desa Apar memiliki rata-rata skor sebesar 3,27. Artinya, responden *stakeholder*

Tabel 3. Dampak Sosial Penetapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyus.

No	Kategori	Rataan Skor <i>Stakeholder</i>						Rata-Rata	Keterangan
		Pelaku usaha	Tenaga Kerja	Pengelola	DKP Provinsi	Aperatur Desa	Tokoh Adat		
1	Keterlibatan masyarakat lokal	1,7	3	3	4	1	1	2,28	Kurang baik
2	Tingkat konflik dengan masyarakat lokal	3	3	4	4	3	3	3,33	Sangat baik
3	Frekuensi kriminalitas	4	4	4	4	4	4	4,00	Sangat baik
4	Aksesibilitas	3	3	3	3	3	3	3,00	Baik
5	Pelayanan petugas	3	3	3	3	3	3	3,00	Baik
6	Keamanan area parkir	4	4	4	4	4	4	4,00	Sangat baik
Total rataan skor		3,12	3,33	3,50	3,67	3,00	3,00	3,27	Sangat Baik

Sumber : Data primer diproses, 2024.

memiliki persepsi yang positif dan termasuk ke dalam kategori sangat baik terhadap kondisi sosial dari kegiatan ekowisata di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyus Kota Pariaman.

Kategori dengan rataan skor tertinggi adalah frekuensi kriminalitas dan keamanan area parkir yang memiliki nilai sebesar 4,00. Nilai tersebut menunjukkan bahwa frekuensi kriminalitas tergolong rendah atau tidak terjadi kriminalitas pada kawasan ekowisata Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyus dan keamanan area parkir di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyus tergolong sangat bagus dikarenakan area parkir luas dapat digunakan oleh berbagai jenis kendaraan termasuk bus, tertata, serta terdapat penjaga dan dinilai sangat baik.

Keterlibatan masyarakat lokal merupakan kategori dengan rataan skor terendah yaitu sebesar 2,28. Nilai tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal pada kawasan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyus Kota Pariaman tergolong kurang baik, ini dikarenakan masyarakat lokal kurang dilibatkan pada kegiatan ekowisata di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyus. Perbandingan dampak sosial akibat penetapan ekowisata Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyus Kota Pariaman ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rinaldi., & Syafrini, 2023), yang menyatakan kurangnya keterlibatan masyarakat lokal pada kawasan konservasi penyus Kota Pariaman serta adanya konflik antara pengelola UPT dengan masyarakat sekitar kawasan dikarenakan tidak dilibatkan apapun yang berkaitan dengan UPT Konservasi Penyus Kota Pariaman.

Berdasarkan Gambar 1, penilaian *stakeholder* terhadap kondisi sosial penetapan ekowisata Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyus Kota Pariaman dengan rataan skor tertinggi berasal dari DKP Provinsi Sumatera Barat, kemudian diikuti

oleh pengelola dan tenaga kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyus Kota Pariaman. Responden Aperatur Desa Apar dan Tokoh Adat/ Tokoh Masyarakat Desa Apar memiliki rataan skor terendah dibandingkan dengan *stakeholder* lainnya. Meskipun demikian, seluruh *stakeholder* memiliki persepsi positif terhadap kondisi sosial di ekowisata Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyus Kota Pariaman. Penjelasan untuk setiap kategori kondisi sosial dari kegiatan ekowisata di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyus Kota Pariaman dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keterlibatan masyarakat lokal

Keterlibatan masyarakat lokal di Kawasan ekowisata UPT Konservasi Penyus Kota Pariaman dinilai kurang baik dengan skor rata-rata sebesar 2,28. Berdasarkan penilaian *stakeholder* t. masyarakat lokal belum cukup dilibatkan dalam berbagai kegiatan ekowisata, seperti menjadi pemandu edukasi, membantu kegiatan dari pihak luar, dan mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan. Oleh karena itu, UPT Konservasi Penyus Kota Pariaman perlu meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dengan menerapkan prinsip pemberdayaan agar ekosistem berjalan secara berkelanjutan sehingga meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat sekitar.

2. Tingkat konflik dengan masyarakat lokal

Tingkat konflik dengan masyarakat lokal di ekowisata UPT Konservasi Penyus Kota Pariaman dinilai sangat rendah dengan skor rata-rata 3,33. Konflik yang terjadi bersifat kecil, seperti kesalahpahaman dan kecemburuan sosial akibat belum dilibatkannya masyarakat sebagai guide. Penyelesaian konflik dilakukan melalui musyawarah dan telah berhasil mencegah pertikaian lebih lanjut. Meskipun pengelolaan sepenuhnya di bawah Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Sumatera Barat, dukungan masyarakat lokal sangat penting agar ekowisata dapat berkembang berkelanjutan. Untuk mengantisipasi konflik, diperlukan keterbukaan dan kesepakatan saat merekrut masyarakat lokal bekerja di UPT.

3. Frekuensi kriminalitas

Tingkat kriminalitas di kawasan ekowisata UPT Konservasi Penyu Kota Pariaman sangat rendah dengan skor penilaian 4. Keamanan kawasan dijaga ketat, terutama oleh satpam yang bertugas sepanjang malam hingga pagi hari sebelum UPT dibuka, guna mencegah tindak pencurian dan menjaga ketertiban.

4. Aksesibilitas

Aksesibilitas ekowisata Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman dinilai berdasarkan kondisi jalan dan akses untuk menuju kawasan wisata. Berdasarkan penilaian persepsi responden *stakeholder*, aksesibilitas ekowisata Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman dinilai baik dengan rata-rata skor sebesar 3,00. Menurut persepsi responden, kondisi jalan menuju Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman cukup baik dan dapat dilewati, namun agak sempit. Hal ini dikarenakan karena lokasi wisata yang letaknya bukan di jalan besar sehingga hanya dapat dilewati oleh jenis kendaraan kecil dan sedang seperti motor dan mobil. Maka dari itu, perlu adanya akses jalan yang lebar agar kendaraan besar dapat menjangkau area ekowisata atau wisatawan yang datang menggunakan kendaraan besar dapat difasilitasi dengan baik sehingga tetap dapat berkunjung ke ekowisata Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman dengan mudah dan nyaman. Kemudahan jalan yang lebar untuk memarkirkan kendaraan wisatawan dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong wisatawan untuk berkunjung kembali.

5. Pelayanan petugas

Pelayanan petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman dinilai berdasarkan pelayanan dan ketersediaan petugas

di setiap area wisata. Hasil penilaian persepsi responden *stakeholder* terhadap pelayanan petugas mendapatkan nilai 3,00. Artinya, pelayanan petugas di kawasan ekowisata Unit Pelaksana Teknis (UPT) konservasi Penyu Kota Pariaman dinilai baik. Hal ini dibuktikan dengan pelayanan yang diberikan petugas kepada wisatawan, seperti petugas melayani wisatawan dengan ramah walaupun tidak terdapat petugas yang standby di setiap area untuk membantu pengunjung, dikarenakan petugas yang bekerja sebagai pemberi edukasi di area kolam hanya berjumlah satu orang. Walaupun demikian, pelayanan petugas yang baik dapat memberikan rasa puas bagi wisatawan yang akan berdampak positif pada ulasan ekowisata Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman. Kepuasan wisatawan perlu diutamakan dan menjadi poin penting dalam industri ekowisata karena dapat memperluas jangkauan promosi dari mulut ke mulut sehingga lebih banyak wisatawan yang berkunjung ke kawasan ekowisata Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman.

6. Keamanan

Keamanan ekowisata Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman dapat memengaruhi kepuasan wisatawan dalam berwisata. Keamanan wisata dinilai berdasarkan kondisi area parkir dan atau tidaknya penjaga (tukang parkir) di area ekowisata. Hasil penilaian responden *stakeholder* terhadap keamanan mendapatkan nilai 4,00 dengan kategori sangat baik. Hal ini karena area parkir tersedia di luar kawasan ekowisata Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman tidak terlalu luas sehingga hanya dapat digunakan untuk parkir mobil dan motor, area cukup tertata, dan terdapat tukang parkir. Maka dari itu, perlu adanya perluasan area fasilitas parkir agar bisa menampung lebih banyak kendaraan, khususnya kendaraan berukuran besar. Selain itu, untuk keamanan sangat baik dikarenakan adanya satpam untuk menghindari tindak pencurian di kawasan ekowisata sehingga memberikan rasa aman bagi wisatawan.

Tabel 4. Matriks Kepentingan dan Pengaruh *Stakeholder*.

No	Stakeholder	Kepentingan	Pengaruh	Strategi Pengelolaan
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tinggi	Tinggi	Libatkan aktif dalam pengambilan keputusan
2	Pengelola UPT	Tinggi	Tinggi	Libatkan secara penuh
3	Pelaku Usaha	Tinggi	Sedang	Libatkan dan berdayakan
4	Aperatur Desa	Sedang	Sedang	Libatkan dan berdayakan
5	Tenaga Kerja	Sedang	Sedang	Libatkan dan berdayakan

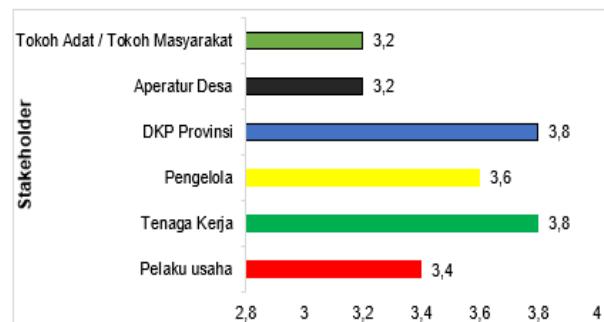
PERSEPSI *STAKEHOLDER* TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN

Dampak lingkungan dari penetapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman melalui hasil wawancara dengan kuesioner kepada *stakeholder* yang terdiri dari pelaku usaha, tenaga kerja, pengelola Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Aperatur Desa Apar, dan Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Desa Apar. Perhitungan skala likert menggunakan lima kategori aspek lingkungan, yaitu kondisi kebersihan lingkungan, kemudahan membuang sampah, keindahan alam, kualitas udara, dan kualitas air. Hasil perhitungan skala likert dampak lingkungan terhadap penetapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5 Menunjukkan bahwa persepsi *stakeholder* memiliki total skor sebesar 3,27. Artinya, responden *stakeholder* yang terdiri dari pemilik usaha, tenaga kerja, pengelola Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Aperatur Desa Apar, dan Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat memiliki persepsi positif dan masuk dalam kategori sangat baik terhadap kondisi lingkungan di ekowisata Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman. Kategori dengan rata-rata skor tertinggi adalah kualitas udara dengan rata-rata skor sebesar 4,00. Kemudahan membuang sampah merupakan kategori dengan rata-rata skor terendah, yaitu sebesar 3,00, tetapi masih dalam kategori baik. Seharusnya ekowisata yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman lebih menambah tempat sampah di sekitar kawasan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman. Selaras dengan penelitian yang dilakukan Ridwan (2017), bahwa kurangnya kesadaran pengunjung dan masyarakat sekitar

kawasan dalam memilah sampah ke tempat sampah yang sudah disediakan. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Alfianti *et al.*, 2021) bahwasannya masyarakat kurang kesadarannya dalam menjaga kebersihan ekowisata karena kurangnya SDM yang berkompeten dan kurangnya sosialisasi dari *stakeholder*.

Berdasarkan Gambar 1 ditunjukkan bahwa penilaian terhadap kondisi lingkungan ekowisata Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman rata-rata tertinggi berasal dari *stakeholder* Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dan tenaga kerja. Meskipun demikian, seluruh *stakeholder* memiliki persepsi positif terhadap lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) konservasi Penyu Kota Pariaman



Gambar 1. Perbandingan Dampak Lingkungan Penetapan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Sumber: (Data primer diproses, 2024)

Berikut merupakan penjelasan untuk setiap kategori terhadap kondisi lingkungan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman:

1. Kebersihan lingkungan

Kondisi kebersihan lingkungan di kawasan ekowisata Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman dinilai berdasarkan banyak tidaknya sampah yang berserakan dan timbul atau

Tabel 5. Dampak Lingkungan Penetapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu.

No	Kategori	Rataan Skor <i>Stakeholder</i>						Rata-Rata	Keterangan
		Pelaku usaha	Tenaga Kerja	Pengelola	DKP Provinsi	Aperatur Desa	Tokoh Adat		
1	Kebersihan lingkungan	3	4	3	4	3	3	3,33	Kurang baik
2	Kemudahan membuang sampah	3	3	3	3	3	3	3,00	Baik
3	Keindahan alam	4	4	4	4	3	3	3,67	Sangat baik
4	Kualitas udara	4	4	4	4	4	4	4,00	Sangat baik
5	Kualitas air	3	4	4	4	3	3	3,50	Sangat baik
Total rata-rata skor		3,40	3,80	3,60	3,80	3,20	3,20	3,27	Sangat baik

Sumber : Data primer diproses, 2024.

tidaknya bau tidak sedap. Berdasarkan penilaian responden *stakeholder*, kebersihan lingkungan mendapatkan nilai rata-rata skor sebesar 3,33. Artinya, kondisi kebersihan lingkungan di kawasan ekowisata Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman dinilai sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi lingkungan yang bersih, tidak ada sampah berserakan, dan tidak menimbulkan bau tidak enak dikarenakan terdapat petugas kebersihan yang bertugas membersihkan kawasan wisata, baik pada pagi hari sebelum wisata dibuka, siang hari, dan sore hari ketika wisata akan ditutup. Lingkungan wisata yang bersih tentu akan memberikan rasa nyaman bagi wisatawan sehingga dapat menarik wisatawan untuk berkunjung kembali.

2. Kemudahan membuang sampah

Kemudahan membuang sampah di kawasan ekowisata Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman dinilai berdasarkan banyak tidaknya tempat sampah dan akses untuk menemukan tempat sampah. Penilaian responden *stakeholder* terhadap kemudahan membuang sampah mendapatkan nilai rata-rata skor sebesar 3,00. Artinya, kemudahan membuang sampah di kawasan ekowisata Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman dinilai baik. Hal ini dikarenakan tempat sampah tersedia dan cukup mudah dijangkau di kawasan wisata. Tempat sampah yang disediakan juga sudah menerapkan prinsip pemilahan sampah organik dan anorganik, meskipun dalam aplikasinya masih belum maksimal. Hal ini ditandai dengan masih terdapat sampah yang tercampur antara sampah organik dan anorganik di beberapa titik yang disebabkan karena kurangnya kesadaran *stakeholder* dalam memilah sampah. Fasilitas pembuangan sampah dapat dikelola lebih baik lagi, yaitu dengan menambah jumlah tempat sampah dan mengganti tempat sampah yang tidak layak pakai. Penting juga untuk membuat penanda sampah organik dan anorganik, serta menambahkan papan pengingat dengan slogan, seperti “buanglah sampah pada tempatnya” agar dapat meningkatkan kesadaran *stakeholder* dalam membuang sampah. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga kawasan ekowisata agar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman dapat tetap lestari.

3. Keindahan alam

Keindahan alam di kawasan ekowisata Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman dinilai berdasarkan kondisi pemandangan alam dan menarik atau tidaknya destinasi ekowisata untuk dikunjungi kembali. Berdasarkan penilaian

responden *stakeholder*, keindahan alam di kawasan ekowisata Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman dinilai sangat baik dengan rata-rata skor sebesar 3,67. Responden *stakeholder* menilai bahwa pemandangan alam di kawasan ekowisata sangat indah dan sangat menarik minat wisatawan untuk berkunjung kembali. Hal ini dikarenakan keindahan alam yang disuguhkan tidak hanya berupa pantai yang menjadi nilai jual utama, namun juga terdapat wisata mangrove yang menjadi daya tarik tambahan, serta kawasan wisata yang masih asri sehingga dapat menenangkan pikiran. Banyak wisatawan datang untuk berekreasi dan menikmati keindahan alam yang asri untuk melepas penat dari jenuhnya rutinitas sehari-hari. Oleh karena itu, keindahan alam di kawasan ekowisata Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman perlu untuk dijaga dan dilestarikan agar ekowisata dapat tetap ada dan berkelanjutan.

4. Kualitas udara

Kualitas udara di kawasan ekowisata Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman dinilai berdasarkan kondisi kesegaran, kebersihan, dan berpolusi atau tidaknya udara. Hasil penilaian persepsi responden *stakeholder* terhadap kualitas udara mendapatkan nilai 4,00 dan merupakan kategori dengan nilai tertinggi. Artinya, kualitas udara di kawasan ekowisata Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman dinilai sangat baik dan menjadi keunggulan bagi kawasan wisata. Menurut responden *stakeholder* udara di kawasan wisata terasa sangat segar, bersih, tidak berbau sehingga tidak berpolusi dan tidak mengganggu pernafasan. Kualitas udara yang bersih dan segar dapat tercipta karena kawasan wisata masih asri dengan dikelilingi pepohonan serta pantai. Selain itu, karena lokasinya yang berada di jalan kecil membuat kendaraan tidak banyak berlalu lalang sehingga dinilai tidak berpolusi. Kondisi udara yang sangat segar dapat dirasakan apabila berkunjung ke kawasan ekowisata pada pagi hari dikarenakan hawanya yang masih sejuk. Kualitas udara di ekowisata Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman perlu untuk dipertahankan bahkan ditingkatkan agar dapat menjadi daya tarik yang dapat meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung.

5. Kualitas air

Kualitas air di kawasan ekowisata Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman dinilai berdasarkan kondisi kejernihan dan tingkat kekeruhan air, baik untuk keperluan cuci tangan dan toilet. Kategori ini dinilai sangat

baik dengan rata-rata skor sebesar 3,50. Meskipun demikian, kualitas atau kejernihan air di kawasan ekowisata Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman cukup jernih dikarenakan menggunakan air pam yang disalurkan melalui pipa ke kamar mandi yang ada pada kawasan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu dan ada satu ketika air PAM tersebut sedikit berwarna. Akan tetapi untuk kuantitas air, tersedia dalam jumlah banyak. Kualitas air di kawasan ekowisata Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman perlu ditingkatkan dan diperhatikan, seperti adanya filtrasi agar selalu dalam kondisi bersih dan jernih sehingga timbul rasa aman bagi wisatawan maupun stakeholder yang menggunakannya.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN UPT KONVERSI PENYU

Masyarakat merupakan *stakeholder* yang memiliki nilai penting tinggi dan pengaruh rendah, nilai penting yang tinggi bagi masyarakat karena konservasi penyu mempengaruhi kegiatan ekonomi mereka. Pengaruh yang rendah disebabkan kapasitas masyarakat yang masih rendah. Oleh karena itu, kebijakan kegiatan pemanfaatan konservasi penyu yang diperlukan adalah melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini membutuhkan dukungan dan pendampingan dari *stakeholder* terkait seperti penyuluh, LSM atau pemda. Menurut Raharjana, D. T., & Kutanegara (2019) kegiatan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup. Kebijakan ini perlu dilakukan agar masyarakat yakin bahwa kebutuhan mereka sejalan dengan tujuan pengelolaan konservasi penyu dan keterlibatan mereka dalam konservasi penyu sangat bermakna.

Dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan UPT Konservasi Penyu Pariaman, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman dibantu oleh beberapa pihak. Seperti Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pariwisata Pariaman, Perusahaan Swasta, dan juga masyarakat sekitar tentunya. Hal inilah yang membuat kegiatan wisata dan pelestarian penyu di kawasan ini masih dapat berjalan hingga saat ini.

Masyarakat sekitar kawasan konservasi penyu di Pariaman merupakan *stakeholder* yang memiliki nilai penting tinggi namun pengaruh rendah. Nilai penting tinggi karena konservasi penyu berpengaruh langsung terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, seperti pariwisata, hasil laut, dan usaha kreatif berbasis lingkungan. Namun, pengaruh masyarakat

masih rendah akibat keterbatasan kapasitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun akses terhadap sumber daya. Setiap *stakeholder* memberikan kontribusi sesuai ruang lingkupnya untuk mengembangkan kawasan konservasi penyu. Seperti melakukan promosi, memberikan pelatihan kreatifitas, membuka area perdagangan, serta menjaga keamanan dan keindahan kawasan UPT konservasi Penyu Pariaman.

Sebagai respons terhadap situasi tersebut, kebijakan yang ditetapkan adalah melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat, sehingga mereka merasa bahwa kebutuhan mereka sejalan dengan tujuan pengelolaan konservasi penyu. Dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan UPT Konservasi Penyu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pariwisata Pariaman, Perusahaan Swasta, dan Masyarakat sekitar.

PENUTUP

Persepsi *stakeholder* terhadap konservasi penyu memberikan kontribusi penting, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, pemahaman *stakeholder* tentang isu-isu konservasi, prioritas, dan peran mereka memberikan wawasan untuk mengembangkan strategi konservasi yang efektif. Secara praktis, persepsi ini memengaruhi tindakan nyata *stakeholder*, mulai dari partisipasi dalam program konservasi hingga dukungan terhadap kebijakan pelestarian. Penetapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu di Kota Pariaman memiliki dampak yang signifikan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari segi ekonomi, UPT ini memberikan kontribusi yang sangat tinggi terhadap pendapatan masyarakat lokal, terutama bagi pelaku usaha dan tenaga kerja yang terlibat dalam sektor ekowisata. Hal ini sejalan dengan pendapat Scheyvens dalam (Mulyana, 2019) yang menyatakan bahwa ekowisata merupakan salah satu wisata alternatif dianggap salah satu cara untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan karena dianggap bisa memberikan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, serta meningkatkan pengembangan kemampuan berusaha serta memberikan kesempatan yang lebih besar untuk mengontrol penggunaan sumber daya alam di daerah tertentu sebagai salah satu aset kegiatan bisnis ekowisata (Ashley & Roe, dalam Mulyana, 2019).

Pada aspek sosial, terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti rendahnya keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan ekowisata. Meskipun tingkat konflik dan frekuensi kriminalitas di kawasan ini tergolong rendah, penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar mereka merasa memiliki dan berkontribusi dalam pengelolaan kawasan konservasi. Keterlibatan masyarakat dapat memperkuat hubungan antara pengelola dan masyarakat, serta mengurangi potensi konflik yang mungkin timbul.

Pada perspektif lingkungan, UPT Konservasi Penyu menunjukkan kondisi yang baik, dengan kualitas udara dan keindahan alam yang dinilai sangat baik oleh *stakeholder*. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal kebersihan lingkungan dan kemudahan membuang sampah. Penambahan fasilitas pembuangan sampah dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan di kawasan ini.

Keberlanjutan pengelolaan UPT konservasi Penyu untuk pengembangan ekowisata secara berkelanjutan perlu melibatkan *stakeholder* yang berperan penting yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman, Lembaga Swadaya Masyarakat seperti WWF, Pokmaswas, dan KMPP, serta Kepala desa. Peran mereka untuk mendukung peraturan dan integrasi program konservasi antar *stakeholder* lainnya dengan meningkatkan koordinasi *stakeholder*, sinkronisasi peraturan, penerapan sanksi dan penerapan peran *stakeholder* terkait. Peran mereka sangat penting untuk kebijakan yang mendukung keberlanjutan kawasan konservasi akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi UPT konservasi Penyu Kota Pariaman.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui program Beasiswa Unggulan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Pengelola dan Pekerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu Kota Pariaman, Aparatur Desa Apar, Tokoh Adat atau Tokoh Masyarakat Desa Apar, dan pelaku usaha sekitar kawasan konservasi penyun.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Dengan ini kami menyatakan bahwa kontribusi masing-masing penulis dalam penulisan makalah ini adalah: Halimah Dwi Yolanda sebagai

kontributor utama, Kastana Sapanli dan Nuva sebagai anggota kontributor.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianti, D., Solikaturun, S., & Rahmawati, R. (2021). Modal Sosial Dalam Pengembangan Ekowisata di Desa Marente Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 3(1), 120–132.
- Anggarini, D. R. (2021). Dampak Sektor Pariwisata Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah Lampung. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 7(2), 116–122.
- Arieta, S., Budiarti, M., & Igiati, T. S. (2023). Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Bidang Lingkungan Hidup: Konservasi Penyu Di Kabupaten Kepulauan Anambas Indonesia. *Journal of Management and Social Sciences*, 2(1), 73–90.
- Arifin, S., Darmawan, D., Jahroni, J., Khayru, R. K., & Lestari, U. P. (2023). Persepsi risiko dan kepercayaan pelanggan dalam mempengaruhi loyalitas pelanggan terhadap produk elektronik ramah lingkungan. *Jurnal of Management and Social Sciences*, 1(4), 172–182.
- Arikunto, S. (2021). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ario, R., Wibowo, E., Pratikto, I., & Fajar, S. (2016). Pelestarian habitat penyu dari ancaman kepunahan di turtle conservation and education center (TCEC), Bali. *Jurnal Kelautan Tropis*, 19(1), 60–66.
- Badan Pusat Statistik. Kota Pariaman Dalam Angka 2024. (2024).
- Barat, D. K. D. P. P. S. (2024). *Jumlah Penyu Dan Telur Penyu Di Unit Pelaksana Teknis (Upt) Konservasi Penyu Kota Pariaman Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Barat*.
- Barat, P. G. P. S. *Pergub No 3 tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Bara.*, (2019).
- Disti, M. (2023). *Estimasi Nilai Ekonomi Wisata Dan Dampak Lingkungan Kegiatan Wisata Pemandian Alam (Studi Kasus: Objek Wisata Pemandian Tirta Kali Batu Putih (Ptkbp) 41 Singkut, Kabupaten Sarolangun, Jambi)*. Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Firliansyah, E., Kusriani, M. D., & Sunkar, A. (2017). Pemanfaatan dan efektivitas kegiatan penangkaran penyu di Bali bagi konservasi penyu. *Journal of Tropical Biodiversity and Biotechnology*, 2(1), 21–27.
- Harnino, Ze., Taurus, I. Nyoman, Yoga Parawangsa. P., Luthfiana, A. S., Aprilianita Sari, Dan Sulastris, A.rsad, & Tukad, Pp. (2021). Efektifitas pengelolaan konservasi penyu di turtle conservation and education center Serangan, Denpasar Bal. *Journal of Marine and Coastal Science*, 10(1), 242–255.

- Harteti, Sri, Sambas Basuni, Burhanuddin Masy, F. Y. (2014). *Peran Para Pihak Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Penyu Pangumbahan*. Thesis. Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan Dan Ekowisata. Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Hasyir, G. (2020). *Analisis Kebijakan dan Dampak Pengembangan Kawasan Wisata Darajat Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut*. Thesis. Departemen Ekonomi Sumberdaya Lingkungan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Istiqomah, A., sti, Meti, E., kayani, . Nuva. , Danang, P. Pramudita, Bahroin, I., & Idris, A. . O. (2019). Economic Benefits Of Natural Tourism Activities To Fulfill Household Expenditure And Conservation Of National Park. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 24(3), 280–288.
- Jannah, R. C. F., Yusmardono, Y., & Fathoni, F. S. (2022). Konservasi dan pengelolaan penyu: peran swasta dalam perlindungan satwa langka. *Learning Society: Jurnal CSR, Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 57–70.
- Komarudin, N., & F. (2023). Implementation Of Turtle Conservation Policy In The Nipah Essential Ecosystem Area For The Sustainability Of Aquatic Resources And Environment. *Jurnal Biologi Tropis*, 23(1), 360–368.
- Marlian, N., Zurba, N., & Rahmayanti, F. (2021). Sosialisasi Penyelamatan Penyu Aceh di Pantai Suak Geudubang Aceh Barat. *Marine Kreatif*, 5(2).
- Mulyana, E. (2019). Upaya pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya pada masyarakat melalui pengembangan bisnis ekowisata. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 1(1), 38–43.
- Nisa, A. H., Hasna, H., & Yarni, L. (2023). Persepsi. *KOLONI*, 2(4), 213–226.
- Nofita, B. (2020). *Analisis Persepsi Pengunjung Dan Manfaat Ekonomi Keberadaan Kampung Budaya Sindangbarang*. Departemen Ekonomi Sumberdaya Lingkungan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Nurizky, M. (2023). *Analisis Ekonomi Dan Strategi Pengembangan Wisata Pantai Randusanga Indah Brebes Jawa Tengah*. Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2004 Tentang Konservasi Sumberdaya Ikan.
- Puspita, M. (2015). Orporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder Dan Legitimacy Gap Dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan. *Parsimonia-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 89–109.
- Putra, Ilhami., Alrazi., & , and Azmi, F. (2022). Dampak UPTD. Penangkaran Penyu Kota Pariaman Terhadap Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat Desa Apar Kota Pariaman (2013–2020). *Journal Kronologi*, 4(3).
- Raharjana, D. T., & Kutanegara, P. M. (2019). Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Cagar Budaya. *Jurnal Tata Kelola Seni*, 5(1), 50–65.
- Rianto, A. (2012). *Studi kasus penangkaran Penyu hijau (Cheloniamydas), di Pantai Pangumbahan, Kabupaten Sukabumi*. Thesis. Program Studi Manajemen Perairan Jurusan Perikanan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanudin Makasar. Jawa Barat.
- Ridwan, E. A., Sara, L., A. (2017). Karakteristik biofisik habitat peneluran penyu hijau (Chelonia mydas) di Pantai Kampa, Konawe Kepulauan. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Perairan*, 2(4), 295–305.
- Rinaldi, Rezki., & A. D. S. (2023). Perilaku Pengunjung Pada Objek Wisata Konservasi Penyu Kota Pariaman. *Jurnal Perspektif*, 6(2), 207–217.
- Salafsky, N., Wollenberg, E., & Clark, D. A. (2001). Combining development with conservation: A conceptual framework for the evaluation of community-based conservation projects. *World Development*, 29(2), 1421–1438.
- Santika, A. (2019). Pengaruh Islamic Social reporting terhadap profitabilitas (return on asset dan return on equity) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 119–132.
- Shambodo, Y. (2020). Faktor yang mempengaruhi persepsi khalayak mahasiswa pendatang UGM terhadap siaran pawartos ngayogyakarta Jogja TV. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 1(2), 98–110.
- Stem, C. J., Lassoie, J. P., Lee, D. R., Deshler, D. D., & Schelhas, J. W. (2003). Community participation in ecotourism benefits: The link to conservation practices and perspectives. *Society & Natural Resources*, 16(5), 387–413.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
- Usman, H. (2016). *Kebijakan Ekonomi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Cakalang Di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah*. Thesis. Program Studi Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Wardani, R. I., & Mulasari, S. A. (2016). Identifikasi formalin pada ikan asin yang dijual di kawasan pantai Teluk Penyu Kabupaten Cilacap. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(1), 43–48.
- Wilson, E. G., D. Allison, A. M. A. M. (2014). Why healthy oceans need sea turtles: the importance of sea turtles to marine ecosystems. *Oceana*.

- Yuliany, E. H., Jakaria, M., Mukharomah, E., & Parwanti, S. (2023). Sustainable Development Goals (SDGs): Peningkatan Pengetahuan Siswa Sebagai Upaya Pelestarian Penyu. *Jurnal SOLMA*, 12(2), 509–515.
- Zikri, Ahmad, Roni Ekha Putera, A. K. K. (2023). Journal Of Social And Policy Issues. *Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Di Kota Pariaman*, 11–18.